



## Keterangan Media

Minggu, 29 Maret 2015

### KENAIKAN BAHAN BAKAR MINYAK

Pengurangan subsidi BBM harus diikuti oleh kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Subsidi tersebut bisa dialihkan ke subsidi non energi yang langsung mengena ke masyarakat misalnya pupuk, benih, dan pangan untuk mencegah inflasi harga-harga secara umum. Dengan celah fiskal yang begitu besar dengan adanya pengurangan subsidi BBM, seharusnya bisa digunakan pemerintah untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur energi terutama energi terbarukan sesuai visi RPJMN 2015-2019 agar Indonesia mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Seharusnya tingginya biaya investasi energi terbarukan tidak menjadi alasan mengingat manfaat jangka panjang bagi rakyat Indonesia. Teknologi bahan bakar dan sumber energi alternatif yang sudah dikembangkan oleh Kemenristek-Dikti dan beberapa Perguruan Tinggi bisa dijadikan acuan untuk dikembangkan ke skala industri.

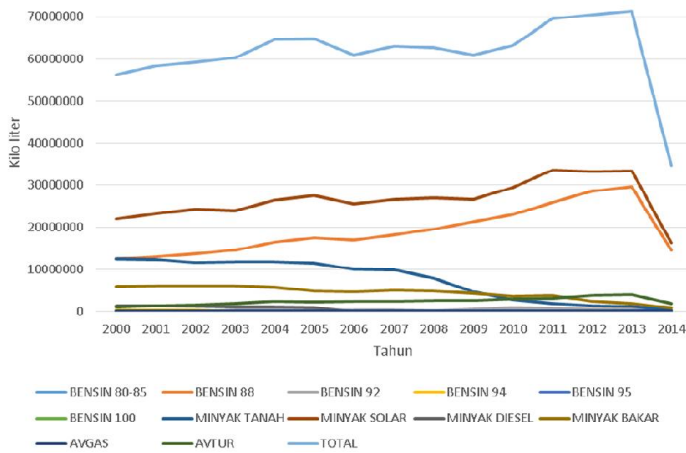
**Harga BBM:** Perubahan harga riil BBM di Indonesia dipengaruhi oleh harga minyak mentah dunia. Subsidi diberikan untuk membantu masyarakat menengah ke bawah dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Saat ini bensin bersubsidi (RON 88) mengalami penyesuaian harga 16 kali sejak era presiden Megawati. Penyesuaian tertinggi terjadi saat subsidi BBM dicabut oleh Presiden Joko Widodo pada 2014, sehingga harga mencapai Rp 8,500 per liter. Subsidi diberikan lagi pada awal Januari 2015. Harga bensin bersubsidi menjadi Rp 7,400 per liter dan solar Rp 6,900 per liter pada akhir Maret ini.

Berlaku		Harga Rupiah (per Liter)						Masa kepresidenan
Tahun	Tanggal	Bensin premium	%	Minyak solar	%	Minyak tanah	%	
2015	28 Maret	Rp7,400.00	▲8.82%	Rp6,900.00	▲7.81%	Rp2,500.00	-	Joko Widodo
	1 Maret	Rp6,800.00	▲1.49%	Rp6,400.00	-	Rp2,500.00	-	
	19 Januari	Rp6,700.00	▼11.84%	Rp6,400.00	▼11.72%	Rp2,500.00	-	
	1 Januari	Rp7,600.00	▼10.58%	Rp7,250.00	▼3.33%	Rp2,500.00	-	
2014	18 November	Rp8,500.00	▲30.76%	Rp7,500.00	▲36.36%	Rp2,500.00	-	SBY
2013	22 Juni	Rp6,500.00	▲44.44%	Rp5,500.00	▲22.22%	Rp2,500.00	-	
2009	15 Januari	Rp4,500.00	▼10%	Rp4,500.00	▼6.25%	Rp2,500.00	-	
2008	15 Desember	Rp5,000.00	▼9.09%	Rp4,800.00	▼12.72%	Rp2,500.00	-	
	1 Desember	Rp5,500.00	▼8.33%	Rp5,500.00	-	Rp2,500.00	-	
2005	24 Mei	Rp6,000.00	▲33.33%	Rp5,500.00	▲27.90%	Rp2,500.00	▲25%	
	1 Oktober	Rp4,500.00	▲87.50%	Rp4,300.00	▲104.76%	Rp2,000.00	▼9.09%	
2003	1 Maret	Rp2,400.00	▲32.59%	Rp2,100.00	▲27.27%	Rp2,200.00	▲22.22%	
	21 Januari	Rp1,810.00	-	Rp1,650.00	▼12.69%	Rp1,800.00	▼8.62%	
2002	1 Januari	Rp1,810.00	▲3.42%	Rp1,890.00	▲35.97%	Rp1,970.00	▲39.71%	
	3 Mei	Rp1,750.00	▲9.37%	Rp1,390.00	▲12.09%	Rp1,410.00	▲7.63%	
	1 April	Rp1,600.00	▲3.22%	Rp1,240.00	▲7.82%	Rp1,310.00	▲3.14%	
	1 Maret	Rp1,550.00	▲6.89%	Rp1,150.00	▲27.77%	Rp1,270.00	▲217.5%	

Tabel 1. Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (Untuk Pulau Jawa)

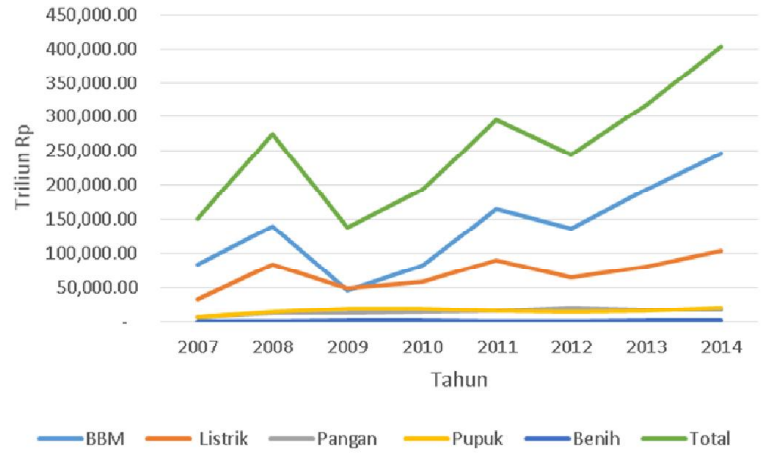
**Subsidi BBM:** Hingga tahun 2014 subsidi mencapai Rp 403 Triliun dimana 60% adalah subsidi BBM dan sisanya subsidi non energi. Untuk subsidi non energi misalnya pangan sebesar Rp 18,16 Triliun (4,5%), pupuk Rp 21,05 Triliun (5,22%), dan benih Rp 1,56 triliun (0,38%). Secara fundamental kebijakan subsidi komoditas rentan terhadap aksi penyelundupan dan penyelewengan dikarenakan disparitas harga. 90% BBM digunakan di sektor transportasi dimana separuhnya merupakan kendaraan pribadi roda empat yang hampir seluruhnya dimiliki kalangan menengah keatas.

Informasi dari Kementerian Keuangan yang bersumber dari Volatilitas Subsidi Energi, kebutuhan subsidi BBM merupakan risiko fiskal terbesar. Hasil *stress test* menunjukkan bahwa faktor risiko makro yaitu **harga minyak** dan **nilai tukar mata uang** adalah faktor risiko utama atas penambahan kebutuhan subsidi BBM. Dua risiko tersebut tidak bisa dikontrol oleh pemerintah, oleh karenanya akan sangat berbahaya bagi ketahanan energi Indonesia kedepannya.



Catatan : - Realisasi penjualan tidak termasuk Own Use. - Penjualan BBM subsidi dan non subsidi belum diaudit. -Data sampai dengan semester I 2014

**Gambar 1. Realisasi Penjualan BBM di Seluruh Indonesia**



**Gambar 2. Anggaran Subsidi**

**Konsumsi BBM:** Hingga akhir 2013, Indonesia mengkonsumsi sekitar 71 juta kilo liter BBM dari berbagai jenis. 29 juta kilo liter diantaranya merupakan bensin bersubsidi dan 33 juta kilo liter solar bersubsidi. Sejak diberlakukannya konversi minyak tanah ke gas elpiji, konsumsi minyak tanah oleh masyarakat berangsur turun. Konsumsi bensin bersubsidi pada tahun 2013 meningkat 101% jika dibandingkan dengan sepuluh tahun sebelumnya.

**Rencana Pemerintah:** Dalam RPJMN 2015-2019 pengurangan subsidi BBM akan memperbesar ruang fiskal untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik. Regulasi harga BBM dan listrik diperlukan agar tercapai rasionalisasi tarif secara bertahap, terencana, dan transparan untuk mendorong energi baru terbarukan, efisiensi energi, dan peningkatan kesehatan keuangan badan usaha termasuk memperluas jangkauan pelayanan. Hal ini dilakukan mengingat kebijakan harga BBM dan listrik saat ini tidak berkelanjutan dan memberatkan keuangan negara sekaligus menghalangi upaya diversifikasi dan konservasi energi.

**Kesimpulan:** 1) Perlambatan pertumbuhan ekonomi dan beban masyarakat yang meningkat adalah dampak dari kenaikan BBM; 2) Pengurangan subsidi BBM yang menghasilkan ruang fiskal bisa untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur, perlindungan kesehatan, pendidikan, dan menekan pencemaran yang diakibatkan oleh polusi energi fosil; 3) Strategi yang harus dilakukan Pemerintah

- a. Rencana Pemerintah dalam membangun bendungan untuk irigasi dan PLTA (*micro-hydro*) harus memiliki *grand design* dan *roadmap* yang terarah agar Investasi di sektor energi terbarukan yang selama ini kurang serius digarap karena dianggap mahal bisa segera dilakukan. Kebijakan ini paralel dengan usaha pemerintah untuk mengurangi penggunaan energi primer fosil di sektor ketenagalistrikan.
- b. Penyediaan transportasi massal yang nyaman dan mendorong revolusi konversi bahan bakar primer minyak bumi dengan energi terbarukan (*biofuel* atau listrik) untuk kendaraan.
- c. Ruang fiskal yang besar bisa dialokasikan untuk menambah subsidi non-energi yang menyentuh langsung masyarakat (pangan, pupuk, dan benih) sehingga Pemerintah dapat mengontrol inflasi.

Sumber: Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, RPJMN 2015-2019, PT Pertamina, Bank Indonesia

Contact Person Dana Mitra Lingkungan: Afif Maschun ( [info@dml.or.id](mailto:info@dml.or.id) )